

ABSTRAK

Aris Margono, NIM E. 1810042 “EFEKTIVITAS ANGGOTA STAF BAGIAN PERENCANAAN DALAM MENYELENGGARAKAN ANALISA DAN EVALUASI KEGIATAN BRIMOB DI MAKO KORP BRIMOB KELAPA DUA DEPOK”. Skripsi. Fakultas, Hukum Universitas Djuanda Bogor.2022. Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik, jika ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi institusi yang memiliki kompetensi handal dengan indikator profesional, bermoral, dan modern. Penyelenggara Urusan bidang Sumber Daya Manusia adalah unit kerja yang ada di satuan kerja Mabes Polri, satuan kerja Kepolisian Daerah dan satuan kerja Kepolisian Resor yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia Polri adalah pegawai negeri pada Polri yang bekerja sebagai penggerak organisasi Polri dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah Untuk mengetahui peranan Anggota Mako Korps Brimob Kelapa Dua dalam menyelenggarakan dan Evaluasi Kegiatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Anggota Mako Korp Brimob Kelapa Dua dalam menyelenggarakan dan evaluasi kegiatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari birokrasi, tidak terlepas untuk melaksanakan transformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan dan birokrasi yang menjadi agenda prioritas nasional saat ini, juga merupakan salah satu wujud inisiatif strategis dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Danpas Brimob akan bertugas untuk memimpin, membina, mengawasidan menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf seluruh jajaran Pas Brimob di wilayah masing-masing. Serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri. Diketahui penguatan struktur organisasi Brimob ini merujuk Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Kata Kunci : Staf Bagian Perencanaan, Analisa, Evaluasi

ABSTRACT

Aris Margono, NIM E. 1810042 "EFFECTIVENESS OF PLANNING DEPARTMENT STAFF MEMBERS IN CONDUCTING ANALYSIS AND EVALUATION OF BRIMOB ACTIVITIES AT THE MAKO CORPORATE BRIMOB KELAPA DUA DEPOK". Thesis. Faculty, Law, Juanda University, Bogor. 2022.

Police Human Resources are the Police's most important asset in carrying out bureaucratic reform and in realizing the goals of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The nation's competitiveness can only be built properly, if it is supported by qualified and superior human resources. For this reason, Polri must prepare itself to become an institution that has reliable competence with professional, moral and modern indicators. The organizer of Human Resources affairs is a work unit in the work unit of the National Police Headquarters, the work unit of the Regional Police and the work unit of the Resort Police which organizes human resource development activities. Polri Human Resources are civil servants within the Polri who work as a driving force for the Polri organization and function as an asset whose capabilities must be trained and developed. The purpose of writing this Thesis Research Proposal is as follows: To find out the role of members of Mako Brimob Kelapa Dua Corps in organizing and evaluating activities based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, to find out the factors that become obstacles for Members Headquarters of the Mobile Brigade Corps Kelapa Dua in organizing and evaluating activities based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The research method used by the author in this study is the Normative Juridical research method, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The results of the research are that the Indonesian National Police (Polri) as part of the bureaucracy, cannot be separated from carrying out institutional transformation. Institutional and bureaucratic reform which is currently a national priority agenda, is also a form of strategic initiative in facing the challenges of governance and efforts to realize a Precise Police (Predictive, Responsible and Fair Transparency). carry out control of staff tasks for all ranks of Pas Brimob in their respective regions. As well as providing advice and consideration and responsibility to Dankorbrimob Polri. It is known that the strengthening of the organizational structure of Brimob refers to Presidential Regulation (Perpres) RI Number 54 of 2022 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 52 of 2010 concerning Organizational Structure and Work Procedures of the Indonesian National Police.

Keywords: Planning, Analysis, Evaluation Staff